

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN PASAR DI
DESA TITIAN MODANG KECAMATAN KUANTAN
TENGAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

SKRIPSI

*Syarat mencapai Gelar Sarjana Sosial
Disusun dan diajukan untuk melengkapi dan memenuhi Syarat mencapai
Gelar Sarjana Sosial Program Pendidikan Strata Satu Program Studi
Administrasi Negara*



Oleh

**LITA YANLESTARI
NPM . 210411039**

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
TELUK KUANTAN
2025**

PENGESAHAN SKRIPSI

Diperiksa dan Disahkan oleh Tim Penguji Skripsi
Program Studi Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Islam Kuantan Singingi

Pada :
Hari : Rabu
Tanggal : 22
Bulan : Mei
Tahun : 2025

Tim Penguji

KETUA

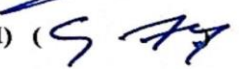


RIKA RAMADHANTI, S.IP., M.Si
NIDN. 1030058402

SEKRETARIS



SARJAN M., S.Sos., M.Si
NIDN. 1008128002

1. EMILIA EMHARIS, S.Sos., M.Si (Pembimbing I) ()
2. DESRIADI, S.Sos., M.Si (Anggota Penguji I) ()
3. SAHRI MUHARAM, S.Sos., M.Si (Anggota Penguji II) ()

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Islam Kuantan Singingi



RIKA RAMADHANTI, S.IP., M.Si
NIDN. 1030058402

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL : Implementasi Kebijakan Pengelolaan Pasar Dalam
Menunjang Pendapatan Asli Desa (PADes) Di Desa Titian
Modang Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan
Singingi.

NAMA : Lita Yanlestari

NPM : 210411039

UNIVERSITAS : Universitas Islam Kuantan Singingi

FALKUTAS : Ilmu Sosial

PROGRAM STUDI : Administrasi Negara

Telah Diperiksa dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

PEMBIMBING I



EMILIA EMHARIS, S.Sos., M.Si
NIDN. 1002059002

PEMBIMBING II



SARJAN M, S.Sos., M.Si
NIDN. 1008128002

Mengetahui,

Ketua Program Studi Administrasi Negara
Universitas Islam Kuantan Singingi



EMILIA EMHARIS, S.Sos., M.Si
NIDN. 1002059002

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN HASIL KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Lita Yanlestari
 NPM : 210411039
 Fakultas : Ilmu Sosial
 Program Studi : Administrasi Negara
 Universitas : Islam Kuantan Singingi
 Alamat : Desa Titian Modang Kecamatan Kuantan Tengah
 Kabupaten Kuantan Singingi

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tulisan yang saya buat atau karya ilmiah yang saya hasilkan dengan judul **Implementasi Kebijakan Pengelolaan Pasar Dalam Menunjang Pendapatan Asli Desa Di Desa Titian Modang Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2024** merupakan hasil karya saya sendiri tidak melakukan kegiatan plagiasi atau meniru hasil skripsi orang lain.

Apabila terdapat dengan secara sengaja melakukan kegiatan plagiasi atau meniru hasil skripsi orang lain, maka saya dengan senang hati bersedia dituntut sesuai dengan prosedur dan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan keaslian hasil karya ilmiah atau skripsi ini dibuat dengan sesungguhnya dan dibuat dengan keadaan sadar serta tidak ada paksaan dari pihak manapun dan siapapun.

Titian Modang Kopah, Februari 2025



LITA YANLESTARI
 NPM. 210411039

ABSTRAK

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN PASAR DALAM MENUNJANG PENDAPATAN ASLI DESA DI TITIAN MODANG KECAMATAN KUANTAN TENGAH

**OLEH :
LITA YANLESTARI
210411039**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Pengelolaan pasar Dalam Menunjang Pendapatan Asli Desa di desa Titian Modang, Pengelolaan merupakan istilah yang dipakai dalam ilmu manajemen secara etimologi pengelolaan berasal dari kata "kelola" (*to manage*) dan biasanya menunjuk pada proses mengurus atau menangani sesuatu untuk mencapai tujuan. Penelitian deskriptif kualitatif ialah metode penelitian yang menjelaskan temuan di lapangan yang tidak memerlukan hipotesis. Kemudian menjelaskan temuan di lapangan.. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Lokasi penelitian dilakukan di desa titian modang. Berdasarkan hasil penelitian Maka Peneliti Mengambil Kesimpulan Bahwa Keterlibatan Pemerintahan Desa dan Pengelola Pasar/ Bumdes dalam Pengelolaan Pasar Dalam Menunjang Pendapatan Asli Desa di Desa Titian Modang Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi masih Belum Ter Implementasikan dengan Baik.

Kata kunci : Implementasi, Kebijakan, Pengelolaan

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF MARKET MANAGEMENT POLICY TO SUPPORT VILLAGE ORIGINAL INCOME IN TITIAN MODANG, KUANTAN TENGAH DISTRICT

**BY :
LITA YANLESTARI
210411039**

This study aims to determine the Implementation of Market Management Policy in Supporting Village Original Income in Titian Modang Village, Management is a term used in management science etymologically management comes from the word "manage" (to manage) and usually refers to the process of managing or handling something to achieve goals. Qualitative descriptive research is a research method that explains findings in the field that do not require hypotheses. Then explain the findings in the field. The theoretical basis is used as a guide so that the focus of the research is in accordance with the facts in the field. The location of the research was carried out in Titian Modang Village. Based on the results of the study, the researcher concluded that the involvement of the Village Government and Market Managers/Bumdes in Market Management in Supporting Village Original Income in Titian Modang Village, Kuantan Tengah District, Kuantan Singingi Regency Has Not Yet Been Implemented Properly.

Keywords: Implementation, Policy, Management

DAFTAR ISI

	Halaman
TANDA PERSETUJUAN	i
SURAT PERNYATAAN.....	ii
MOTTO	iii
KATA PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK	vii
ABSTRACT.....	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	7
1.4.1 Manfaat Teoritis.....	7
1.4.2 Manfaat Praktis.....	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	8
2.1 Landasan Teori	8
2.1.1 Teori/Konsep Administrasi Negara.....	8
2.1.2 Teori/Konsep Kebijakan Publik	20
2.1.3 Teori/Konsep Pemerintahan Desa	25
2.1.4 Teori/Konsept Implementasi Kebijakan Publik	32
2.1.5 Teori/Konsep Pengelolaan.....	38
2.1.6 Teori/ Konsep Pendapatan asli Desa	41
2.2 Kerangka Pemikiran	44
2.3 Definisi Operasional	45

2.4	Konsep Variabel.....	46
BAB III METODE PENELITIAN		47
3.1	Jenis Penelitian	47
3.2	Informan	47
3.3	Sumber Data	48
3.3.1	Data Primer.....	48
3.3.2	Data Sekunder.....	48
3.4	Fokus Penelitian	49
3.5	Lokasi Penelitian	49
3.6	Metode Pengumpulan Data	49
3.6.1	Observasi	49
3.6.2	Wawancara	49
3.6.3	Dokumentasi	50
3.7	Metode Analisis Data	50
3.7.1	Reduksi Data (<i>Data Reduction</i>).....	51
3.7.2	Pengumpulan Data (<i>Data Display</i>).....	51
3.7.3	Penarikan kesimpulan (<i>Conclusion Verivication</i>)	52
3.8	Jadwal Penelitian	53
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN		54
4.1	Sejarah Singkat Desa Titian Modang.....	54
4.2	Luas Dan Batas Wilayah	54
4.3	Penduduk	55
4.4	Perekonomian Desa Titian Modang.....	56
4.5	Pemerintahan Desa Titian Modang.....	56
4.6	Pendidikan Desa Titian Modang.....	57
4.7	Kesehatan Desa Titian Modang.....	58
4.8	Kondisi Sosial Budaya	58
4.9	Kondisi Pemerintah Desa	60
4.9.1	Pembagian Wilayah Desa.....	60
4.9.2	Struktur Organisasi Pemerintah Desa.....	60
4.10	Visi Misi Desa.....	61

4.11 Tugas dan fungsi pemerintah desa.....	63
4.12 Tugas dan Fungsi BUMDes.....	67
4.13 Keagamaan.....	72
4.14 Struktur Organisasi BUMDes.....	75
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN.....	75
5.1 Identitas Informan.....	75
5.1.1 Identitas Informan Berdasarkan Jenis Kelamin.....	75
5.1.2 Informan Menurut Kelompok.....	76
5.1.3 Informan Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	76
5.2 Hasil dan Pembahasan.....	77
5.2.1 Indikator Tentang Komunikasi.....	77
5.2.1.1 Kejelasan implementasi Kebijakan Pengelolaan Pasar..	78
5.2.1.2 Keefektifitasan implementasi Kebijakan Pengelolaan Pasar.....	80
5.2.1.3 Keefisiensian implementasi Kebijakan Pengelolaan Pasar.....	82
5.2.2 Indikator Tentang Sumber Daya.....	84
5.2.2.1 Sumber Daya Manusia Yang Ada Dalam implementasi Kebijakan Pengelolaan Pasar.....	84
5.2.2.2 Penggunaan Sumber Daya Finansial Dari implementasi Kebijakan Pengelolaan Pasar.....	86
5.2.2.3 Sumber Daya Alam sudah Memadai untuk implementasi Kebijakan Pengelolaan Pasar.....	88
5.2.3 Indikator Tentang Disposisi.....	91
5.2.3.1 Implementasi Kesadaran Dan Pemahaman Pemerintah Desa dan Masyarakat dalam Pengelolaan Pasar Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Desa.....	91
5.2.3.2 Sikap Responsif Dan Inovatif Pemerintah Desa dan Masyarakat dalam Pengelolaan Pasar Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Desa.....	93
5.2.3.3 Sikap Komitmen dan Dedikasi Pemerintah Desa dan Masyarakat dalam Pengelolaan Pasar Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Desa.....	95
5.2.4 Indikator Tentang Struktur Organisasi.....	97

5.2.4.1 Alur Kerja Yang Efisien dalam Pengelolaan Pasar Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Desa.....	98
5.2.4.2 Mekanisme Pengawasan Dan Evaluasi Implementasi Kebijakan pengelolaan pasar.....	100
5.2.4.3 Peran Tanggung Jawab Pemdes Dan Masyarakat dalam Implementasi Kebijakan Pengelolaan Pasar.....	101
BAB VI PENUTUP.....	109
6.1 Kesimpulan.....	109
6.2 Saran.....	109
DAFTAR PUSTAKA.....	110
LAMPIRAN.....	112

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pasar adalah tempat terbuka di mana setiap proses transaksi jual-beli dilakukan secara langsung. Di pasar tradisional, pelanggan tidak selalu menjadi pembeli, tetapi pengunjung mungkin bias menjadi penjual, bahkan semua orang dapat menjual dagangan mereka di pasar tradisional.

Pasar Tradisional adalah sektor ekonomi yang sangat penting bagi sebagian besar Indonesia. Orang miskin, yang mengandalkan kehidupan mereka di pasar tradisional tidak tidaklah sedikit. Menjadi pedagang di pasar tradisional, adalah pekerjaan alternatif di pusat perdagangan Indonesia. Wilayah dibentuk atas dasar peluang ekonomi, daerah, budaya, sosial, politik, demografi, dan pertimbangan lainnya yang memungkinkan otonomi ke daerah. Sebagaiman tertera didalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah menjelaskan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban dalam otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan setempat sesuai dengan peraturan perundangundangan. Dengan memberikan otonomi di daerah, memungkinkan organisasi dan manajemen rumah untuk meningkatkan efisiensi dan hasil administrasi publik dalam konteks layanan publik.

Pasar memegang peran penting dalam memajukan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat Fungsi penting pasar tradisional di samping sebagai tempat untuk produk produk masyarakat di sekitarnya (lokal), juga

merupakan lapangan kerja yang sangat bermanfaat bagi masyarakat. Hasil-hasil pertanian yang dihasilkan petani dapat dijual langsung ke pasar. Untuk membawa hasil-hasil pertanian tadi dibutuhkan tenaga kerja. Tenaga kerja tidak semata membawa hasil petani ke pasar, namun ketika pedagang membeli hasil-hasil pertanian, pedagang membutuhkan tenaga angkut untuk bekerja di pasar tidak diperlukan syarat khusus seperti pegawai kantor yang paling penting mempunyai kemauan untuk bekerja dan tidak mudah berputus asa dalam merintis usaha.

Dalam pasar terdapat banyak interaksi yang tidak ditemukan dalam pasar modern. Pada pasar tradisional, para pembeli dan penjual bertemu secara langsung untuk melakukan transaksi jual-beli. Sebelum kesepakatan terjadi, pedagang menawarkan barang dengan harga tertentu kemudian pembeli akan menawar barang tersebut dengan harga yang masih bisa terjangkau oleh pedagang. Dalam proses tawar-menawar di sini dituntut masing-masing antara penjual dan pembeli. Penjual cenderung bertahan pada harga yang telah ditawarkan kepada pembeli, sementara itu pembeli dengan kepiawaiannya dapat menawar dengan harga yang sangat rendah. Dalam proses tawar-menawar itu dapat terbangun sebuah keakraban antara penjual dan pembeli.

Pasar desa ini identik dengan tempat yang bau, becek dan kotor dan jalannya yang kurang bagus. Kondisi pasar yang demikian membuat sebagian masyarakat lebih memilih berbelanja di pasar modern dan sejenisnya. Agar hal itu tidak terjadi maka perlu dilakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas SDM, juga keterlibatan pemerintah desa sangat diperlukan, sehingga hal negatif terhadap pasar tradisional dapat dihilangkan.

Pendapatan asli Desa adalah penerimaan Desa yang diperoleh atas usaha sendiri sebagai pelaksanaan kewenangan Desa, baik dalam bentuk hasil usaha Desa, hasil aset, swadaya partisipasi dan gotong royong, dan pendapatan asli desa lain. Pendapatan Asli Desa dapat diperoleh dari :

1. Hasil usaha

Hasil usaha adalah seluruh hasil usaha milik Desa yang dikelola secara terpisah. Salah satu hasil usaha yang menimbulkan penerimaan bagi pendapatan Desa dari hasil usaha Desa, antara lain hasil BUM Desa.

2. Hasil aset

Hasil aset adalah seluruh hasil dari barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli milik Desa, dibeli atau diperoleh atas beban APB Desa atau perolehan hak lainnya yang sah. Seperti; tanah kas Desa, pasar desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan Desa, pelelangan ikan yang dikelola oleh Desa, pelelangan hasil pertanian, hutan milik desa, mata air milik Desa, pemandian umum, wisata Desa dan lain-lain kekayaan asli Desa

3. Swadaya, partisipasi dan gotong royong

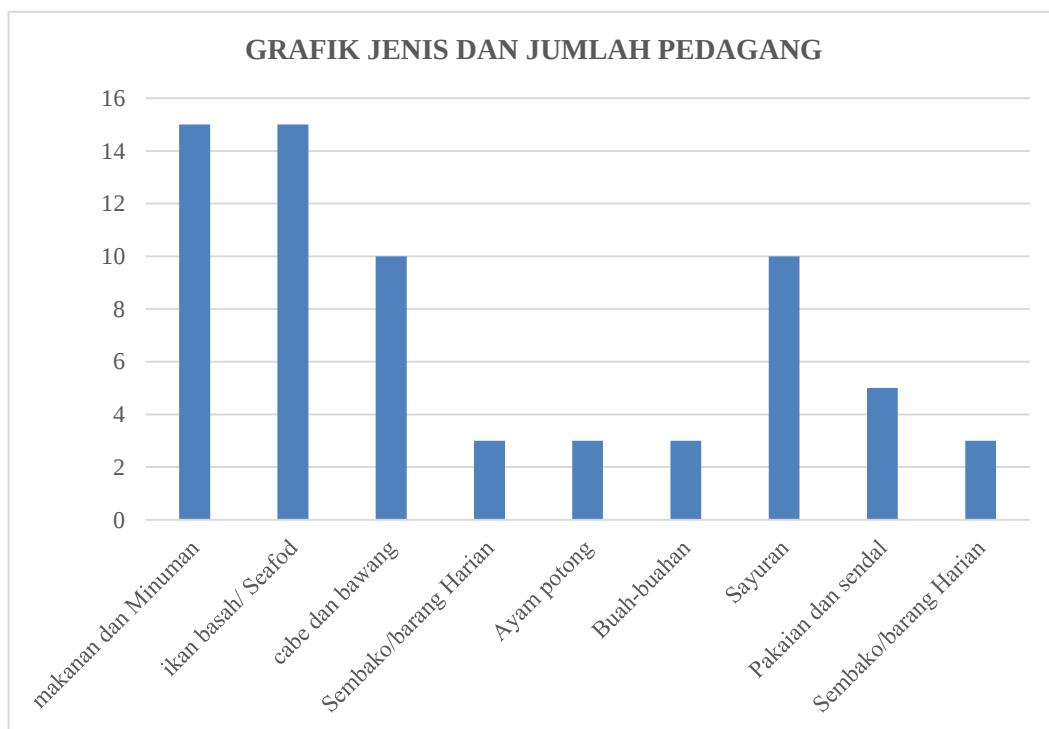
Swadaya, partisipasi dan gotong royong masyarakat adalah penerimaan yang berasal dari sumbangan masyarakat Desa. Penganggaran penerimaan swadaya, partisipasi dan gotong royong harus dihitung secara cermat dan riil dalam bentuk uang yang masuk ke rekening kas Desa untuk mendukung pelaksanaan suatu kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa.

4. Pendapatan asli Desa lain

Pendapatan asli Desa lain adalah penerimaan Desa yang diperoleh antara lain dari hasil pungutan Desa sesuai dengan kewenangan Desa yang ditetapkan dan diatur dalam Peraturan Desa. Pemerintah Desa dilarang melakukan pungutan Desa di luar yang ditetapkan dan diatur dalam Peraturan Desa dan penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang pungutan Desa wajib mendapat evaluasi dari Bupati.

Pasar Desa Titian modang Merupakan Salah satu pasar desa yang Beroperasi Setiap hari sabtu, Pasar Ini Berada Didesa titian modang Yang Terbilang paling besar dan satu- satunya di Kenegrian Kopah. Pasar Terdiri 8 Los. Dan Lebih Kurang 6 Los nya Yang Terpakai saat hari Pasarnya dan Mempunyai 20 Lapak Dan Juga Dipasar Desa Titian Modang Sudah Ada Wc Yang disediakan oleh Pengelola Pasar.

Tabel 1.2 Jumlah Pedagang di pasar Desa Titian Modang Kopah



Berdasarkan Tabel di atas Tentang Jenis dan jumlah pedagang didesa titian Modang Kopah dapat kita lihat bahwa terdapat beberapa jenis pedagang yaitu :

1. Pedagang Ikan Basah Dan Seafood
2. Pedagang Ikan Kering
3. Pedagang Sayuran
4. Pedagang Cabe Dan Bawang
5. Pedagang buah-buahan
6. Pedagang makanan dan minuman
7. Pedagang pakaian
8. Pedagang sembako
9. Pedagang ayam potong

Pada Pasar Desa Titian Modang Kopah Jumlah Pedagang yang Berjualan yaitu Lebih Kurang 67 Akan tetapi jumlah pedagang ini juga tidak tetap dari tahun ketahun terdapat penambahan dan pengurangan pedagang dalam pasar tersebut, dan Jumlah Pembelinya lebih kurang berjumlah 200 orang karena dalam pasar tidak ada penetapan pembeli pada setiap pasar dilakukan. Jumlah pedagang tidak tetap dan selalu terjadi pasang surut hal ini juga mempengaruhi pendapatan yang terima pasar, pedagang yang Berjualan Berasal dari Luar Dan Juga dari dalam Desa Titian Modang.

Tabel 1.1 Penerimaan PADes Dari Retribusi Pasar Desa Titian Modang

Pengelolaan pasar desa merupakan kegiatan dan tindakan terhadap pasar desa mulai dari perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, serta pengawasan dan untuk menentukan pencapaian target pendapatan asli desa yang telah

ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia. Dalam rangka meningkatkan pendapatan desa yang bersumber dari pasar secara efektif dan efisien perlu adanya pengelolaan pasar desa yang baik dan berpihak kepada masyarakat. Karena setiap organisasi memerlukan sumber pendapatan untuk menjalankan roda-roda organisasi dalam proses pencapaian sebuah tujuan.

Pengelolaan pasar desa oleh Pemerintah Desa Dan Bumdes Desa dalam rangka meningkatkan pendapatan asli desa masih kurang optimal dalam pelaksanaannya, hal ini terlihat sebagai berikut :

1. Belum ditetapkan target oleh pemerintah desa dari setiap pos sumber pendapatan asli desa, sehingga pengelolaan pasar terkesan kurang diperhatikan. Hal ini terlihat bahwa dalam realisasinya tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
2. Belum adanya kejelasan pembagian tugas dalam pengelolaan pasar meskipun telah dibentuk susunan pengurus/pengelola pasar. Hal ini nampak dari adanya penduduk setempat yang melakukan aktivitas pembersihan pasar padahal bukan menjadi tugasnya.

NO	TAHUN	JUMLAH RETRIBUSI
1	2021	RP.19.200.00
2	2022	RP.14.400.00
3	2023	RP. 9.600.00
4	2024	RP. 4.800.00

3. Belum tersedianya petunjuk teknis pengelola pasar Desa Titian Modang sehingga pengelola tidak berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini nampak dari pengelola pasar yang tidak melaksanakan tugasnya.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas maka penulis

mengambil judul penelitian/sekripsi “**Implementasi Kebijakan Pengelolaan Pasar Dalam Menunjang Pendapatan Asli Desa di Pasar Desa Titian Modang Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.**)

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi di atas maka dapat dirumuskan masalah sebagai Bagaimana implelementasi kebijakan Pengelolaan Pasar dalam Menunjang Pendapatan Asli Daerah desa titian modang Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.

1. 3 Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan Penelitian ini adalah Untuk mengetahui implelementasi kebijakan Pengelolaan Pasar dalam Menunjang Pendapatan Asli Desa di Desa Titian Modang Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian diharapkan dapat menjadi salah satu bahan untuk digunakan sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Dapat mengetahui ilmu pengetahuan secara praktis sebagai hasil pengamatan sarta dapat memahami disiplin ilmu yang di peroleh selama studi di perguruan tinggi khususnya di bidang Ilmu pendidikan

1.4.2 Manfaat praktis

Sebagai salah satu langkah pemecahan masalah atau dapat dijadikan bahan untuk merumuskan kebijakan kedepannya.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Administrasi Negara

Administrasi Negara diartikan sebagai mekanisme penyelenggaraan mesin pemerintahan yang juga disebut mekanisme penyelenggaraan mesin pemerintahan yang juga disebut birokrasi. Pusat perhatian administrasi administrasi Negara dalam hal ini adalah mekanisme Negara ke dalam (administrasi internal). Administrasi Negara dalam hubungan ini adalah administrasi pemerintahan. (dalam Muhammad, 2019 : 13).

Ilmu administrasi Negara adalah Ilmu Pengetahuan (cabang ilmu administrasi) yang secara khas melakukan studi (kajian) terhadap fungsi intern dan ekstern struktur-struktur dan proses proses yang terdapat di bagian yang sangat penting daripada sistem dan aparatur pemerintahan. Secara singkat, disebut administrasi Negara. Dalam bahasa Inggris Amerika disebut *public administration*, namun lebih tepat disebut *state administration*, dan dalam Bahasa disebut *openbaarr bestuur*. (dalam Muhammad, 2019 : 14).

Administrasi Dalam arti luas Berhubungan dengan kegiatan kerja sama dan upaya (organisasi dan manajemen) yang bersifat sistematis, rasional dan manusiawi yang dilakukan sekelompok orang untuk mencapai tujuan bersama (Nawawi, 2013 : 77).

Studi administrasi negara merupakan studi pembelajaran (bagian studi administrasi) yang dengan khusus melaksanakan pembelajaran atau mengkaji

mengenai tugas internal serta eksternal bagian-bagian serta mekanismemekanisme yang ada pada kawasan yang paling pokok dari manajemen serta aparat-aparat pemerintah. Singkatnya, dikatakan sebagai Administrasi Negara. Pada bahasa Inggris Amerika dikatakan public administration, tapi lebih benar dikatakan *state administration*, serta pada bahasa lainnya dikatakan sebagai *openbaarrbestuur* (Lim, 2015).

2.1.1.1 Ciri-Ciri Administrasi Negara

Karakteristik administrasi negara yang dikemukakan oleh Thoha (1997: 43-45), yaitu:

1. Administrasi negara dalam melayani masyarakat memiliki sifat yang lebih darurat daripada jika yang melayani masyarakat itu adalah instansi-instansi swasta yang lain. Dikatakan darurat atau mendesak sebab pelayanannya berhubungan dengan kepentingan-kepentingan seluruh rakyat serta apabila diwenangkan kepada instansi yang lain, tak akan terlaksana dengan baik.
2. Secara umum, administrasi negara dalam melayani masyarakat memiliki sifat yang semi monopoli ataupun memonopoli masyarakat.
3. Pada saat melayani rakyat, adminsitrase negara serta yang menjalankan administrasi pasti disesuaikan dengan perundang-undangan serta aturan-aturan yang ada. Hal-hal tersebut mengadakan warna-warna yang legal dari administrasi negara itu.
4. Harga-harga di pasaran tak bisa mengendalikan administrasi negara dalam melakukan pelayanannya. Administrasi Negara ditetapkan oleh

upaya yang ingin mengabdikan terhadap masyarakat secara menyeluruh.

5. Upaya-upaya yang dilaksanakan oleh administrasi negara biasanya digantungkan kepada masukan masyarakat yang diberikan pelayanan (Suardita, 2016).

Karakteristik dari administrasi negara yang lain bisa dimanfaatkan dalam melihat perbedaan dan memberikan deskripsi dengan tepat berdasarkan institusi serta bisa dijabarkan, yakni :

1. Administrasi negara merupakan sebuah program yang harus dilakukan (*unavoidable*). Semua manusia pada kehidupannya pasti berkaitan pada administrasi negara. Dimulai pada saat dilahirkan dan nantinya meninggal pun manusia tak bisa lepas dari melakukan aktivitas administrasi negara. Bisa sebagai rakyat sipil atau rakyat dari luar negeri yang tak bisa menghindari aktivitas administrasi negara ini.

2. Administrasi negara membutuhkan adanya sifat yang patuh. Pada hal tersebut administrasi negara memiliki hak untuk memonopoli dalam menggunakan wewenangnya serta kekuasaannya untuk melakukan pemaksaan pada semua rakyat sipil agar patuh pada aturan-aturan serta semua keputusan yang sudah ditentukan.

3. Administrasi negara memprioritaskan sesuatu. Terdapat aktivitas yang dapat dilaksanakan oleh administrasi publik. Dimana semua hal tersebut tak bisa habis seluruhnya. Memprioritaskan sesuatu dibutuhkan untuk rakyat, karena apabila tak ada yang diprioritaskan, dapat muncul sebuah aktivitas yang dapat dilaksanakan dengan optimal serta sebaliknya.

4. Administrasi negara tak memiliki batasan dalam pengukurannya. Luas daerah program administrasi negara melingkupi semua kawasan negara, pada darat, pada lautan, serta pada udara. Bisa dilihat sangat besarnya skala dari program, serta hal-hal itu tidak mudah dilakukan pengukuran. Tak terdapat organisasi-organisasi negara yang bisa menyaingi organisasi-organisasi milik negara serta tak ada program administrasi dari instansi yang lain yang lebih besar dibandingkan administrasi negara.

5. Pemimpin yang paling atas memiliki sifat yang politis. Administrasi negara diketuai oleh aparat-aparat pemerintahan. Hal tersebut bermakna mengenai pemimpin yang paling tinggi dalam administrasi diduduki oleh Ahmad Mustanir pejabat-pejabat yang terpilih serta terangkat sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang sudah ada.

6. Untuk melaksanakan administrasi negara tidak mudah untuk dilakukan pengukuran. Sebab administrasi negara serta beberapa programnya memiliki sifat yang politis serta target-targetnya yaitu agar tercapainya kedamaian, bebas, aman, sehat, berpendidikan, adil, makmur, ketahanannya, merdeka, serta sama sehingga hal-hal itu tidak mudah untuk dilakukan pengukuran.

7. Terdapat hal-hal yang menjadi harapan dalam berjalannya administrasi negara, pada kaitan tersebut bisa ada dua kriteria dalam menilai, pada sebuah kelompok rakyat mengharapkan administrasi negara bertindak bagi pemenuhan kebutuhannya. Pada kelompok lainnya dari administrasi negara, ahli, pendanaan, serta sumber lainnya memiliki batasan. Rakyat berharap agar aparat-aparat dari administrasi negara harus memberikan perlindungan kepada masyarakat umum

dan tidak cuma terhadap satu kelompok.

Di sisi lain, Nigro & Nigro dalam *Modern Public Administration* (Syahfri, 2012: 127) mengemukakan karakteristik kegiatan administrasi negara antara lain:

1. Adanya sekelompok orang yang bekerja sama untuk mengembangkan negara. Terdapat tiga lembaga, yaitu: legislatif, eksekutif, serta yudikatif, dan ketiga lembaga tersebut saling berhubungan.
2. Sangat berperan untuk merumuskan suatu kebijaksanaan dalam negara agar jadi elemen dari mekanisme pemerintahan.
3. Secara gamblang tidak sama dengan administrasi administrasi swasta.
4. Mempunyai hubungan yang kuat pada banyak organisasi organisasi swasta ataupun perorangan dalam melayani rakyat.

Ciri-ciri dari program administrasi negara bisa dijelaskan, yaitu:

1. Berfokus untuk melayani masyarakat dengan baik mengenai kepentingan-kepentingan masyarakat (*service making*).
2. Melayani masyarakat dengan sifat *urgent*.
3. Menjalankan serta output-output dari pelayanan bergantung pada pendapat masyarakat umum (*public accountability*).
4. Melayani masyarakat dengan menggunakan sifat semi monopoli atau monopoli (*no competition*).
5. Target dalam melayani masyarakat ini yaitu mensejahterakan masyarakatnya (*social welfare*). Hal tersebut lepas daripada mekanisme pemerintahan yang diyakini oleh sebuah negara.

6. Target itu ditentukan oleh rakyat lewat perwakilannya (lembaga-lembaga yang menjadi wakil rakyat).
7. Semua program yang dilaksanakan diikat oleh hukumhukum yang sesuai dengan undang-undang atau aturanaturan yang ada (*legalistic approach*).
8. Semua aparat-aparat pemerintahan merupakan pihak yang melaksanakan semua program untuk kepentingankepentingan rakyat serta tak berpihak terhadap suatu kelompok (Amani, 2013).

2.1.1.2 Fungsi Administrasi Negara

Tugas administrasi negara pada tugas pelaksanaannya, Fayol (Winardi, 1989:4) membedakan tugas administrasi menjadi 5 nilai penting, yakni:

1. Merencanakan
2. Mengorganisasi
3. Memimpin
4. Melaksanakan pengoordinasian
5. Melaksanakan pengawasan

Prinsip-Prinsip Umum Administrasi Negara Dasar-dasar administrasi negara Simon (1998: 68-69) (Noviyanti, 2015), yaitu:

1. Efektivitas dari administrasi dilakukan melalui peningkatan spesialisasi tugas diantara sekelompok orang.
2. Efektivitas administrasi dilakukan melalui peningkatan lewat pengaturan bagian-bagian pihak pada sebuah hierarki pewenangan yang tepat.
3. Efektivitas administrasi dilakukan melalui peningkatan lewat pembatasan jarak-jarak dalam mengawasi masingmasing perusahaan pada instansi

hingga menjadi semakin sedikit.

4. Efektivitas administrasi membedakan tugas-tugas dalam mengawasi, sesuai dengan: a. Tujuan b. Proses c. Langganan d. Tempat

Prinsip-prinsip lainnya dijabarkan oleh 2 ilmuwan, yaitu, Henri Fayol (dilakukan peninjauan dengan psikologi), serta Max Weber (dilakukan peninjauan pada birokrasinya). Henri Fayol menjabarkan nilai-nilai secara luas dari pengadministrasian serta menjadikan dasar bagi pola pikir untuk mengembangkan administrasi (Ekowanti and Tamrin, M, 2022), yaitu:

1. Dibagikannya tugas-tugas (*division of labor/work*). Prinsip tersebut tidak berbeda pada dibagikannya pekerja dalam pendapat Adam Smith, dibagikannya pekerjaan ataupun mengspesialkan peningkatan keproduktivitasan sebab berfokus kepada tugas masing-masing berdasarkan keahliannya.
2. Wewenang dan tanggung jawab (*authority and responsibility*). Pewewenangan serta pertanggungjawaban patut muncul pada saat melaksanakan suatu program. Harus terdapat hal yang mendorong program yang dijalankan secara optimal serta hukuman untuk pihak yang tidak melaksanakan program dengan tidak optimal.
3. Disiplin (*discipline*). Berdisiplin yaitu menghormati serta patuh terhadap peran-peran serta target dari sekelompok orang.
4. Kesatuan perintah (*unity of command*). Kesatuan instruksi ataupun perintah-perintah; pegawai kelas bawah cuma bisa mendapatkan komando serta mempertanggungjawabkannya kepada atasannya.

5. Kesatuan arah dan tujuan (*unity of direction*). Terdapat kelompok-kelompok kegiatan instansi yang memiliki target yang tak berbeda bisa diberikan komando oleh atasannya dengan sebuah perencanaan agar menjadi sebuah persatuan yang berorientasi. Kemitraan sesuai dengan target bersama.
6. Lebih mementingkan kepentingan-kepentingan organisasinya dibandingkan kepentingan-kepentingannya sendiri (*subordination of individual interest to the general interest*). Lebih mementingkan kepentingan-kepentingan orang banyak atau komunitasnya daripada kepentingankepentingannya sendiri.
7. Memberi gaji atau pengupahan (*remuneration*). Memberikan upah ataupun menggaji adalah membayar untuk membalas jasa-jasa yang wajib dilaksanakan secara adil, tak mengeksploitasi, bijaksana, serta memberikan kepuasan bagi orang-orang yang berhubungan.
8. Sentralisasi (*centralization*). Harus dilakukan pengaturan untuk menyeimbangkan desentralisasi serta sentralisasi, yakni berkaitan dengan perbedaan mana yang bisa melakukan pengurangan pada keikutsertaan untuk menentukan suatu hal.
9. Skala hierarki (*scala chain*). Adalah keterkaitan antara pekerjaan-pekerjaan yang dibuat berdasarkan sebuah hierarki atasan atau bawahan.
10. Tata tertib (*order*). Harus terdapat aturan-aturan yang menertibkan (*order*), peraturan, ketaatan pada sebuah kelompok.
11. Keadilan (*equity*). Pimpinan bisa berbaik hati serta memiliki keterbukaan

terhadap pegawainya serta bersikap adil kepada semua pegawainya, tidak terdapat diskriminasi kepada pegawainya.

12. Stabilitas jabatan (*stability of tenure*). Pada hal tersebut harus berjalan, aman, serta pasti dalam menentukan pekerjaan kepada para pegawainya, agar putaran-putaran yang tinggi adalah sebuah ketidakefektifan.
13. Prakarsa/inisiatif (*initiative*). Pada semua pekerjaan patut diharuskan untuk melakukan pemrakarsaan ataupun adanya inisatif-insiatif.
14. Solidaritas kelompok kerja (*la esprit de corps*). Penyolidaritan dalam sekelompok pekerja dapat menciptakan kesatuan serta sifat setia kawan, bangga bersama-sama, serta terdapat banyak perasaan kepemilikan.

Jadi bisa ditarik kesimpulan mengenai penjelasan nilai nilai administrasi mengenai pendapat dari Herbert A. Simon lebih berfokus terhadap pengefektifitan pada dijalankannya pengspesialisasian. Luther Gulick serta Lyndall Urwick mengemukakan tujuh dasar administrasi yang disingkat POSDCoRB (*Planning Organizing, Staffing, Directing, Coordinating, Reporting, serta Budgeting*) (Muhammad, 2019).

1. *Planning* Program planning ini meneliti, meramalkan, menentukan target, merumuskan kebijakan, mengembangkan kegiatan, serta penetapan langkah-langkah pengerjaan. Seluruh aktivitas tersebut patut dilakukan agar target dalam sebuah komunitas bisa terpenuhi.
2. *Organizing* Program yang melakukan pengorganisiran serta menggunakan beragam sumber daya yang terdapat agar suatu target sekelompok pihak dengan bagian-bagian dari komunitas tersebut bisa tercapai. Organizing

adalah membagikan tugas-tugas keorganisasian pada beberapa program, lalu menggolongkan kepada kelompok yang sama serta membagikan pekerja itu pada karyawan berdasarkan keahlian masing-masing karyawan. Sehingga upaya-upaya yang sudah dikoordinir bisa terpenuhi, organizing dengan vertical mengikat program-program itu lewat pendelegasian tugas serta pertanggung jawaban, serta memberikan kesatuan program itu dengan horizontal lewat beragam cara-cara alat-alat pengadministrasian. Hal itu bisa terlihat pada bagian-bagian organisasi yang memperlihatkan terdapatnya penyusunan seluruh program yang patut dilakukan, serta memberikan gambaran keterkaitan wewenang pada sekelompok orang.

3. *Taffing* Mekanisme perekrutan, menempatkan, melatih, serta mengembangkan sumber daya manusia pada sebuah komunitas merupakan pertanggung jawaban dari administrasi agar tahu mengenai SDM serta bahan-bahan patut disediakan dengan baik serta berkualitas, berkuantitas dengan bervariasi, yang dibutuhkan agar tercapainya target dari suatu instansi. Hal tersebut melingkupi ketersediaan karyawan berdasarkan baganbagian organisasi, dan menetapkan syarat-syarat barang yang dibutuhkan. Walaupun seperti itu, administrasi secara umum berhubungan dengan orang serta berupaya agar suatu target dari sebuah organisasi dapat tercapai lewat manusia. Sehingga yang menjadi objek pokok dari administrasi adalah orang serta tidaklah benda-benda.
4. *Directing* Memberikan pedoman lewat beragam instrument (aturan,

ketetapan, perintah) agar sumber daya manusia pada saat menjalankan pekerjaannya tak melakukan pelanggaran daripada target-target dalam suatu komunitas. Directing adalah memberikan pengarahannya program yang bawah agar dapat tercapainya suatu target yang telah ditentukan. Pada directing, administrasi sering memanfaatkan adanya permintaan-permintaan, perintah, balasan, pelatihan, sanksi, serta lainnya. Termasuk pula pada directing merupakan supervisi serta motivasi.

5. *Coordinating* Melakukan koordinasi pada program dalam beragam cabang yang mempunyai pekerjaan serta mempunyai kegunaan yang tidak sama. *Coordinating* melingkupi program yang menyinkronkan upaya seseorang serta sekelompok orang agar dapat terwujud keharmonisan dalam melaksanakan suatu penugasan. Program yang sudah dikoordinir pada dasarnya ialah agar dapat tercapai suatu target dari sekelompok orang. Pengarang-pengarang tak melakukan pengkoordinasian menjadi sebuah sub dari mekanisme administrasi.

Mereka berpendapat mengenai pengkoordinasian adalah pusat pada administrasi serta sub-sub mekanisme administrasi pastinya melaksanakan pengkoordinasian. Walau seperti itu, walau tidak mudah memandang pengkoordinasian menjadi sebuah sub-sub mekanisme administrasi yang khusus, serta merupakan begitu logis apabila pengkoordinasian timbul pada saat melaksanakan sub-sub mekanisme administrasi tapi sangat tidak logis apabila memandang pengkoordinasian bisa dicapai walau tidak ada upaya yang benar-benar dalam pelaksanaannya.

6. *reporting* Aktivitas membuat laporan, mengemukakan hal-hal yang sudah, sedang, serta dalam perencanaan terhadap kelompok-kelompok yang berkaitan dan yang paling pokok adalah pemimpin dari suatu kelompok.
7. *Budgeting* Sehubungan pada saat merencanakan, melaksanakan, serta mengendalikan dan mempertanggung jawabkan pembiayaan. Sedang nilai-nilai administrasi yang dikemukakan oleh Max Weber (dilakukan peninjauan pada birokrasinya) yaitu :
 1. Adanya Pembagian Kerja. Dibaginya pekerjaan berkaitan dengan keahlian masing-masing pekerjanya.
 2. Adanya Hierarki Posisi. Masing-masing kedudukan yang dibawah dikendalikan serta dilakukan pengawasan oleh pegawai-pegawai level atas.
 3. Aturan Formal dan Regulasi. Melakukan pengaturan pada tindakan pegawai secara menyeluruh, memberikan penjaminan berlangsungnya serta stabilnya kawasan pekerjaan, serta melakukan pengurangan pada tidak pastinya kemampuan pekerja.
 4. Hubungan yang Impersonal. Tak terdapat hal yang mengikat emosi pada bawahan serta atasan hingga memberikan penjaminan tentang jelasnya kedudukan.
 5. Kemampuan yang spesifik serta pelatihan adalah standard yang paling pokok dari posisi administrasi. Hal tersebut berhubungan pada terdapatnya standar-standar yang menyeleksi secara pasti serta tak diangkat serta dihentikan dengan semena-mena.

6. Mempekerjakan karyawan berdasarkan kompetensi. Berdasarkan faktanya, hal itu sering dilaksanakan kemudian menyediakan lowongan-lowongan, jika kemampuan karyawan yang sudah dipilih tak bisa menjalankan pekerjaannya maka harus dilatih ataupun diberi pembekalan dulu sehingga dapat lebih laik lagi.

2.1.2 Kebijakan Publik

Kebijakan publik adalah serangkaian kegiatan, tindakan, sikap, program dan rencana keputusan yang dibuat oleh para aktor (pihak terkait) sebagai upaya untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Suatu kebijakan penting untuk mencapai tujuan dalam organisasi. Kebijakan ini terdiri dari dua aspek, yaitu : politik adalah bentuk respons mengenai peristiwa yang terjadi untuk menyelaraskan harmonisasi minat, menciptakan lembaga untuk perilaku mereka yang memperoleh perilaku irasional pada praktik. (Iskandar, 2012). Ini berarti bahwa politik adalah masalah yang dihasilkan oleh pelatib kebijakan (Pemerintah) sebagai bentuk perumusan berdasarkan peristiwa yang terdiri dari masyarakat. Politik ini lahir dari proses kehidupan sosial yang tidak asing, terisolasi dan sendirian. Berkaitan dengan uraian diatas, dapat dipahami bahwa aktivitas politik adalah upaya untuk mencapai tujuan yang diinginkan, serta cara mengatasi masalah melalui penggunaan fasilitas tertentu dan dalam kerangka waktu yang ditentukan.

Kebijakan ini dapat diimplementasikan oleh individu dan kelompok yang melakukan sejumlah kegiatan/*agency* dan program untuk mencapai tujuan tertentu. Kebijakan juga ditafsirkan sebagai sistem yang terdiri dari proses masuk

dan keluar (Hanafi dan Ma'sum, 2015). Proses kebijakan terdiri dari kebijakan dan implementasi. Pengembangan kebijakan dan implementasi dilakukan oleh sekelompok penguasa atau dikenal sebagai elit politik. Hasil kebijakan dalam bentuk efektivitas kebijakan. Kebijakan publik dapat dimaknai sebagai:

1. Tindakan Yang Bertujuan Untuk Mencapai Tujuan Tindakan Yang Telah Diambil Oleh Pemerintahan
2. Tindakan Yang Diambil Hanya Oleh Pemerintah Dearah Dan Pusat;
3. Manajemen Hal-Hal Tertentu Dan Tidak Melakukan Melakukan Sesuatu Apa Pun (Janrichn Dan, 2007).

Pemahaman semacam itu dapat dimaknai sebagai tujuan pemerintah yang sadar dan ingin mendapatkan target tertentu. Kebijakan dalam undang -undang dan peraturan harus dituangkan. Ini karena dalam undang-undang ada tekanan dan terikat oleh sistem. Setiap kebijakan yang dihasilkan harus diimplementasikan oleh semua tanpa pengecualian dalam undang-undang. Oleh karena itu, sebelum kebijakan ini diterapkan, perlu untuk memastikan proses waktu lembaga yang memiliki wewenang. Kebijakan publik yang menghasilkan undang-undang dan peraturan ialah bagian dari produk politik yang terkait dengan kepentingan publik Namun, kebijakan publik dapat ditingkatkan jika ada indikator dinamis yang mempengaruhi kebijakan. Oleh karena itu, umumnya kebijakan publik yang fleksibel meningkatkan dan memiliki perkembangan. Hasil penilaian masyarakat dipengaruhi oleh proses obsevasi dan restrukturisasi.

Kebijakan publik tidak terlaksana apabila tidak ada proses implementasi kebijakan publik. Implementasi kebijakan publik ialah sejumlah langkah

perumusan dan penguatan kebijakan. Proses implementasi kebijakan publik didasarkan pada mekanisme, sumber daya, dan tautan program kebijakan. (Mutiasari et al, 2016) menerangkan bahwa pelaksanaan kebijakan publik adalah kegiatan yang dilakukan oleh individu dan kelompok untuk mencapai tujuan melalui strategi bersertifikat. Hasil implementasi kebijakan dalam dampak pelaksanaan kebijakan. Hasil evaluasi kebijakan diharapkan (direncanakan) atau kontinjensi (efek samping negatif). Hal ini dapat disimpulkan bahwa setiap strategi akan memiliki implikasi.

Implementasi kebijakan berdampak pada keberhasilan kebijakan itu sendiri. Dikatakan berhasil suatu kebijakan dengan memberikan 10 dampak positif kepada publik. Ini berarti bahwa politik dapat membuat masyarakat lebih diarahkan. Kemudian, pemerintah memiliki kewajiban untuk mengawasi implementasi kebijakan melalui program dan menyusun proses implementasi. Berdasarkan uraian di atas dapat menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan adalah kegiatan, program, dan aktivitas dalam penerapan keputusan kebijakan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dalam keputusan kebijakan.

2.1.2.1 Aspek-aspek yang Mempengaruhi Pelaksanaan dan Dimensi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan ialah proses bertahap setelah kebijakan diumumkan dan sebelum konsekuensi diketahui. Pelaksanaan kebijakan publik tergantung pada beberapa aspek yang saling terkait dan saling bergantung. Diantara aspek tersebut yaitu:

- a. Struktur Birokrasi/ kewenangan

Kewenangan didefinisikan sebagai wewenang dan legimasi pembuat kebijakan. Hal ini terkait dengan posisi kebijakan individu dan institusi (Suryono, 2014). Kewenangan dijelaskan dalam fragmentasi organisasi atau prosedur kerja seperti SOP

b. Komunikasi

Komunikasi ialah kegiatan yang memungkinkan orang untuk mendapatkan ide-ide melalui sistem yang dapat berupa sinyal, simbol, karakter, lisan dan perilaku. Dalam pelaksanaan kebijakan publik (Ruhimat, 2010: Subekti et al, 2017: Syani et al, 2018), komunikasi sangat penting. Informasi komunikasi dapat memiliki dampak yang baik dan implementasi kebijakan yang buruk. Jika informasi dikomunikasikan dengan jelas kepada masyarakat, mengurangi risiko perlawanan di masyarakat dan hanya jika informasi yang diberikan tidak jelas, ada kemungkinan akan diratakan dalam kelompok sosial.

c. Sumber daya

Dalam implementasi kebijakan membutuhkan sumber daya seperti manusia, peralatan dan teknik implementasi (Cartini, 2017: Fahri, 2017). Proses kebijakan implementasi harus dilakukan dengan baik.

d. Disposisi atau sikap dari pelaksana

Sikap (disposisi) ialah sifat aksi politik yang memiliki karakteristik berupa jujur, disiplin, cerdas dan berkomitmen. Jika pemicu kebijakan memiliki disposisi yang baik, proses implementasi kebijakan kemungkinan akan optimal dan jika pemohon kebijakan memiliki disposisi yang buruk, implementasi kebijakan tidak akan terlaksana secara optimal.

Atas dasar uraian ini bisa disimpulkan bahwa ada 4 aspek yang mempengaruhi implementasi kebijakan, yaitu, wewenang, komunikasi, sumber daya dan disposisi. Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Publik Keberhasilan implementasi kebijakan publik melibatkan beberapa pihak yang berkepentingan partisipatif dan demokratis. Evaluasi diperlukan sebagai bentuk tanggung jawab dan kinerja kebijakan publik yang diterapkan. Ada tiga tahap untuk mengevaluasi implementasi kebijakan publik, yaitu:

Evaluasi pada tahapan perencanaan Evaluasi pada tahap perencanaan ini juga disebut *x-ante*, yang berarti bahwa kebijakan diterapkan untuk memilih alternatif prioritas dari beberapa alternatif yang diidentifikasi (Kawengian dan Rares, 2015). Tujuan dari evaluasi fase ini adalah untuk menghindari evaluasi awal kebijakan. Ini juga memberikan informasi tentang kebijakan. Penilaian pada tahap ini juga dapat memberikan penilaian dampak lingkungan awal.

Evaluasi pada tahap pelaksanaan Penilaian implementasi pada ini juga disebut sebagai berkelanjutan. Tujuan dari penilaian ini adalah untuk mengukur kemajuan dalam implementasi dibandingkan dengan proses awal (Prastisha dan Triharjanto, 2020). Tujuan evaluasi adalah untuk memastikan bahwa implementasi dilakukan sesuai dengan perencanaan yang direncanakan. Jika ada kesalahan dibuat dalam proses evaluasi, maka akan segera diselesaikan melalui evaluasi berkelanjutan ini sebagai bagian dari proses rekomendasi. Selain itu, evaluasi berkelanjutan juga dapat mengandung informasi tentang proses implementasi kebijakan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Evaluasi pada tahap pasca pelaksanaan Evaluasi pada tahap ini juga dinamakan *ex-post*. Tujuan

evaluasi adalah untuk menentukan tingkat implementasi (Bangunan dan Sulti, 2016). Selain itu, fase ini juga berusaha untuk menganalisis tingkat produksi kebijakan. Selanjutnya, pada tahap ini, Anda juga dapat mengetahui efektivitas dan dampak pelaksanaan kebijakan yang telah diterapkan. Semua tahap evaluasi harus dilakukan dalam proses implementasi kebijakan untuk menilai tingkat pelaksanaan kebijakan yang diterapkan sesuai dengan rencana yang disepakati. Evaluasi kebijakan Indonesia menggunakan kombinasi tiga bentuk evaluasi. Ini karena tujuan politik yang luas, dan berbagai sumber daya harus mampu memastikan bahwa kegiatan politik diarahkan ke penyelesaian masalah.

2.1.3 Pemerintahan Desa

Kata pemerintahan dan kata pemerintah memiliki pengertian yang berbeda. Pemerintah mengandung pengertian sebagai “*Organ*” atau alat negara untuk menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan, sedangkan pemerintahan mengandung pengertian sebagai “*Fungsi*” dari pemerintah. Istilah pemerintah dalam arti *Organ* atau alat negara, dibedakan menjadi dua yakni Pemerintah dalam arti sempit, khusus hanya menyangkut kekuasaan eksekutif. Menurut UUD 1945, pemerintah ialah Presiden, Wakil Presiden dan dibantu oleh menteri menteri. Pemerintah dalam arti luas adalah semua organ negara termasuk DPR (eksekutif dan legislatif). Pada umumnya, sekelompok individu yang mempunyai wewenang tertentu untuk melaksanakan kekuasaan yang dalam arti ini melaksanakan wewenang yang sah dan melindungi serta meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui perbuatan dan pelaksanaan berbagai keputusan. Sebagaimana dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi

Pemerintahan, bahwa fungsi pemerintahan adalah fungsi dalam melaksanakan administrasi pemerintahan yang meliputi tugas pengaturan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan, dan perlindungan. Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dijelaskan bahwa Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah Negara Republik Indonesia dibentuk untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Negara Republik Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah istimewa dan segala peraturan negara yang mengenai daerah-daerah, akan mengingat hak-hak asal-usul daerah tersebut. Oleh sebab itu, keberadaannya wajib tetap diakui dan diberikan jaminan keberlangsungan hidupnya dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa yang memiliki hak asal-usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kokoh dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Pemerintah desa sebagai penyelenggara pemerintahan dilaksanakan kepala desa yang dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Dalam kehidupan bernegara, pemerintahan sangat dibutuhkan

untuk mengatur rakyat, mengayomi rakyat, serta memenuhi kebutuhan rakyat karena sifat hakikat negara memiliki sifat memaksa, monopoli, dan mencakup keduanya.

Dengan adanya pemerintahan, semua wilayah dan batasbatasnya dapat dikontrol dan diawasi serta dapat diatur dengan mudah. Setiap wilayah memiliki pemerintahan dan perangkat pemerintahannya sendiri mulai dari desa, kelurahan, kecamatan, kabupaten, provinsi, dan pemerintah pusat. Oleh sebab itu, penting bagi kita untuk mengetahui pemerintah desa dan perangkatnya yang dibahas dalam bab pembahasan.

Menurut Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014, Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sedangkan pemerintah desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Mengenai isu utama pemerintahan desa, Eko (2008) menyatakan bahwa pada umumnya adalah Sebagai Berikut :

1. kedudukan dan kewenangan desa.
2. perencanaan pembangunan desa.
3. keuangan desa.
4. demokrasi desa; dan
5. birokrasi desa.

2.1.3.1 Susunan Organisasi Pemerintah Desa

Desa dipimpin oleh seorang kepala desa. Kepala desa dipilih secara

langsung oleh, dan dari penduduk desa warga negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan dengan masa jabatan 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. Kepala desa dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Pengisian jabatan dan masa jabatan kepala desa adat berlaku ketentuan hukum adat di desa adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan dalam peraturan daerah kabupaten/kota dengan berpedoman pada peraturan pemerintah. Dalam Daerah kabupaten/kota dapat dibentuk desa mempunyai kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai desa serta pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota dapat menugaskan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya kepala desa. Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOT) Pemerintahan Desa telah diterbitkan sebagai tindak lanjut dari undang-undang desa. Pemerintahan desa adalah kepala desa dibantu oleh perangkat desa yang terdiri atas sekretariat desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis. Susunan tata kerja pemerintahan desa sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja (SOT) Pemerintahan Desa, antara lain:

1. Sekretaris desa.

Sekretaris desa dipimpin oleh seorang sekretaris desa dan dibantu oleh staf sekretaris. Sekretaris desa paling banyak terdiri atas 3 (tiga) urusan, yaitu

urusan tata usaha dan umum, urusan keuangan, urusan perencanaan, dan paling sedikit 2 (dua) urusan, yaitu urusan umum dan perencanaan serta urusan keuangan. Masing-masing urusan dipimpin oleh kepala urusan (Kaur). Semua itu sesuai Pasal 3 ayat (1), (2), dan (3) Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOT) Pemerintahan Desa;

2. Pelaksana kewilayahan.

Pelaksana kewilayahan merupakan unsur pembantu kepala desa sebagai satuan tugas kewilayahan. Jumlahnya ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dengan kemampuan keuangan desa serta memperhatikan luas wilayah kerja karakteristik, geografis, jumlah kepadatan penduduk, serta sarana prasarana penunjang tugas. Pelaksana kewilayahan dilaksanakan oleh kepala dusun atau sebutan lain. Tugas kewilayahan meliputi, penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa; dan

3. Pelaksana teknis.

Merujuk Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOT) Pemerintahan Desa, Pasal 5 ayat (1), (2), dan ayat (3), pelaksana teknis merupakan unsur pembantu kepala desa sebagai pelaksana tugas operasional. Pelaksana teknis paling banyak terdiri dari 3 (tiga) seksi, yaitu seksi pemerintahan, seksi kesejahteraan, seksi pelayanan, dan paling sedikit terdiri dari 2 (dua) seksi, yaitu seksi pemerintahan, seksi kesejahteraan dan pelayanan.

Pemerintah desa yang dipimpin oleh kepala desa, dibantu oleh sekretaris

desa dan perangkat desa. Perangkat desa terdiri dari atas kepala-kepala urusan, yaitu pelaksana urusan dan kepala dusun. Kepala-kepala urusan membantu sekretaris desa menyediakan data informasi dan memberikan pelayanan. Pelaksanaan urusan adalah pejabat yang melaksanakan urusan rumah tangga desa di lapangan. Kepala dusun adalah wakil kepala desa di wilayahnya. Urusan rumah tangga desa adalah urusan yang berhak diatur dan diurus oleh pemerintah desa. Untuk mengatur, mengurus, dan pengurusan urusannya, pemerintah desa membuat peraturan desa. Peraturan desa dibuat oleh kepala desa bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya.

2.1.3.2 Tugas dan Fungsi Pemerintahan Desa

1. Tugas dan fungsi kepala desa,

kepala desa berkedudukan sebagai kepala pemerintahan desa yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa. Kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Merujuk pada Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOT) Pemerintahan Desa, untuk melaksanakan tugasnya, kepala desa memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan pemerintahan desa, seperti tata praja pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan, dan pengelolaan wilayah;
- b. Melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana

perdesaan dan pembangunan bidang pendidikan kesehatan;

- c. Pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan;
- d. Pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna; dan
- e. Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.

2. Tugas dan fungsi sekretaris desa,

sekretaris desa berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat desa.

Sekretaris desa bertugas membantu kepala desa dalam bidang administrasi pemerintahan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOT) Pemerintahan Desa, sekretaris desa mempunyai fungsi:

- a. Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi;
- b. Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum;
- c. Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran,

- verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan kepala desa, perangkat desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya; dan
- d. Melaksanakan urusan perencanaan, seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

2.1.4 Implementaasi Kebijakan Publik

Pengertian implelementasi kebijakan publik Menurut Delarasi Greendle (1980: 7) implementasi kebijakan public yaitu proses umum dari tindakan administratif yang dapat dipertimbangkan pada tingkat program tertentu. Proses implementasi baru akan dimulai jika tujuan dan peluang diatur, program kegiatan telah ditetapkan dan siap untuk melakukan dana dan akan bertujuan untuk mencapai tujuan tersebut. Jika pemahaman ini diarahkan ke lokus dan pendekatan (perubahan) di mana kebijakan diterapkan untuk berada di garis dengan van untuk tempat dan Handangens dari Van Horn dikutip oleh Pentan (1995: 461) dan Wibawa, et al., (1994 : 15) Pelaksanaan kebijakan adalah tindakan yang dilakukan oleh pemerintah (organisasi) dan sektor swasta baik secara individual maupun dalam kelompok yang ditakdirkan untuk mencapai tujuan. Deskripsi sederhana dari konsep implementasi menurut Lane bahwa implementasi sebagai konsep dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu implementasinya adalah persamaan fungsi dari tujuan produksi dan hasil. Implementasi adalah fungsi yang mencakup tujuan dan tujuan, hasil sebagai produk dan efek. Implementasi ialah persamaan fungsi kebijakan, initiator dan waktu (Sabatier, 1986: 21-48). Dua fungsi fokus pada

kebijakan itu sendiri dan kemudian pada hasil yang dicapai dan dicapai selama periode waktu. Pelaksanaan tujuan kebijakan terkait dengan hasil otoritas lokal. Ini disepakati dengan pendapat Van Meter dan Van Horn (Grindle, 1980: 6) bahwa tujuan kebijakan publik dilakukan melalui kualitas agen pemerintah yang melibatkan beberapa pihak terkait. Studi implementasi kebijakan dibagi menjadi tiga generasi dengan pendekatan untuk belajar dan pemulihan. Pertama oleh studi Pressman dan Vildowski, yang berfokus pada bagaimana satu keputusan diterapkan. Hasilnya memberikan pengakuan taktis yang kompleks atau taktik impulse. Selanjutnya bekerja untuk mengidentifikasi keberhasilan dalam implementasi kebijakan. Model implementasi konseptual di tempat dan diuji di sejumlah daerah yang berbeda. Studi yang dilakukan oleh Carl Van Horn dan Donald Van Mehr dan Daniel Mazmanian dan Paul Sabatiye. Ketiga berfokus pada konsolidasi dan perkembangan pendapatan kebijakan melalui multi-level dan pendekatan yang lebih kompleks sebagai proses dinamis.

2.1.4.1 Model Impelementasi Kebijakan Publik

Menurut widodo (2018:96) dalam studi kebijakan publik terdapat banyak model impelementasi, diantaranya model impelementasi kebijakan publik Van Meter dan Van Horn, Edward III.

1. Model Impelementasi publik Van Meter dan Van Horn

Model impelementasi kebijakan yang paling awal disebut model *top-down* adalah yang dilakukan oleh Van Meter dan Van Horn dalam Labaeni (2015:2) Model ini mengidentifikasi enam variabel yang menghubungkan antara kebijakan dengan kinerja, yaitu:

- a. Standar/ukuran dan tujuan kebijakan
- b. Sumberdaya kebijakan (uang dan insentif lainnya)
- c. Komunikasi antara organisasi terkait dan kegiatan-kegiatanpelaksanaan
- d. Karakteristik atau ciri-ciri badan/instansi pelaksanan (ukuran staf, derajat control hierakis, vitalitas organisasi)
- e. Kondisi social, politik, dan ekonomi (sumber-sumber ekonomi dalam yuridiksi impelementasi, opini publik, dukungan kelompokkepentingan)
- f. Sikaf para pelaksana.

2. Model impelementasi kebijakan Publik Smith

Menurut Smith (1973), dalam proses ada empat variabel yang perlu diperhatikan. Empat variabel tidak sendirian, tetapi merupakan unit yang memengaruhi dan berinteraksi masing -masing. Empat variabel dalam implementasi kebijakan publik, yaitu:

Kebijakan yang akan dijalankan (*idealized policy*).

- a. Dengan kata lain, pola interaksi ideal yang ditentukan oleh pedoman diinduksi.
- b. Kelompok sasaran (target group), Mereka adalah individu yang paling terpengaruh secara langsung oleh kebijakan dan harus mengadopsi pola interaksi yang diharapkan dalam perumusan kebijakan.
- c. Badan Pelaksana, Instansi penegak atau birokrasi pemerintah yang bertanggung jawab untuk menegakkan kebijakan tersebut.
- d. Yaitu faktor lingkungan Faktor lingkungan yang mempengaruhi atau dipengaruhi oleh implementasi kebijakan, seperti aspek budaya, sosial,

ekonomi dan politik.

3. Model implelementasi Mazmania dan Sabatier

Menurut Mazmania dan Sabatier imron (2008:68-69) terdapat dua praspaktif dalam analisis implelementasi, yaitu praspaktif administerasi publik dan praspaktif ilmu politik.

Dari segi administrasi, implementasi pada awalnya dipandang sebagai implementasi kebijakan yang tepat dan efisien. Namun, pada akhir Perang Dunia II, berbagai peneliti administrasi nasional menyadari bahwa administrasi publik sebenarnya tidak hanya diatur oleh mandat resmi, tetapi juga di bawah tekanan dari kelompok kepentingan, anggota parlemen, dan berbagai faktor dalam lingkungan politik. terbukti terpengaruh.

Perspektif ilmu politik mendapat dukungan dari sistem pendapatan dalam kehidupan politik. Pendekatan ini seolah-olah mendobrak perspektif organisasi dalam administrasi publik dan mulai mempertimbangkan pentingnya kontribusi dari luar administrasi publik, seperti: Regulasi administrasi, perubahan selera masyarakat, teknologi baru dan selera masyarakat. Perspektif ini berfokus pada isu analisis implementasi, yaitu seberapa baik hasil dan tujuan kebijakan diselaraskan.

4. Model Impelementasi Kebijakan Publik Edward III

Implementasi kebijakan publik dapat dilihat dari berbagai perspektif dan pendekatan. Salah satunya adalah pendekatan masalah implementasi yang diperkenalkan oleh Edwards III (1948:9-10).dwardsd III mengusulkan pendekatan terhadap masalah implementasi dengan terlebih dahulu mengajukan

dua masalah utama. Berdasarkan dua faktor ini, empat prasyarat utama untuk proses implementasi yang sukses dirumuskan sebagai berikut:

Penelitian ini berfokus pada institusi dan organisasi yang terlibat dalam implementasi kebijakan Retribusi Pasar Dalam Menunjang Pendapatan Asli Desa Titian Modang , maka peneliti menekankan pada model Edwardian. Dengan demikian, mereka lebih menekankan pada unsur-unsur yang ada dalam suatu organisasi atau lembaga, seperti komunikasi, perangai, birokrasi, dan sumber daya. Para peneliti berpendapat bahwa mungkin relevan untuk mempengaruhi faktor-faktor yang termasuk dalam George Edward III dan meningkatkan fenomena yang ada dalam implementasi kebijakan Retribusi Pasar Dalam Menunjang Pendapatan Asli Desa Titian Modang.

a. Faktor Komunikasi (*Commubication*)

Menurut Edward III Dakam Widodo (2018:97), komunikasi adalah proses penyampaian informasi komunikator kepada komunikator. Komunikasi kebijakan mengacu pada proses mengkomunikasikan informasi kebijakan dari pembuat kebijakan (*policy makers*) kepada pelaksana kebijakan (*police implementers*). Widodo (2018:97) menekankan bahwa informasi kebijakan publik harus dikomunikasikan kepada aktor politik agar mengetahui dan memahami isi, tujuan, arah dan kelompok sasaran (*target group*) dari kebijakan tersebut. Mereka dapat mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan implementasi kebijakan agar proses implementasi kebijakan dapat berjalan dengan efektif dan sesuai dengan tujuan dari kebijakan itu sendiri..

b. Sumber Daya (*Resources*)

Edward III dalam Widodo (2018:98) berpendapat bahwa tidak peduli seberapa jelas dan konsisten ketentuan dan peraturan ini, pelaksana kebijakan yang bertanggung jawab untuk menerapkan kebijakan mungkin tidak memiliki sumber daya untuk melakukan tugasnya secara efektif. tidak efektif. diaktifkan.

Sumber daya mengacu pada sumber yang dapat digunakan untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Sumber daya tersebut meliputi sumber daya manusia, sumber daya fasilitas (gedung, peralatan, tanah, dan suku cadang lainnya) yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan..

c. Disposisi (*Disposition*)

Edward III dalam Widodo (2018:104) berpendapat bahwa keberhasilan implementasi kebijakan ditentukan tidak hanya oleh kemauan para pelaku kebijakan (*implementers*) untuk melakukan apa yang sekarang dan mungkin, tetapi juga oleh kemauan para pelaku kebijakan. Mereka memiliki prasangka yang kuat tentang tindakan yang harus diambil.

d. Struktur Birokrasi (*Bureaucratic Structure*)

Struktur birokrasi ini meliputi aspek-aspek seperti struktur organisasi, pembagian wewenang, hubungan antar unit organisasi dalam organisasi, dan hubungan organisasi dengan organisasi eksternal.

Sebagaimana disebutkan di atas, model Edward III yang dikutip dalam buku Subarsono (2006:90) menerapkan kebijakan yang dipengaruhi oleh empat variabel.

1. Komunikasi

Komunikasi menentukan keberhasilan dalam mencapai tujuan

implementasi kebijakan publik. Implementasi yang efektif terjadi ketika pengambil keputusan sudah tahu apa yang mereka lakukan.

2. Sumber daya

Isi kebijakan dikomunikasikan dengan jelas dan konsisten, tetapi implementasi tidak efektif jika pelaksana kekurangan sumber daya untuk mengimplementasikannya, dapat berupa sumber daya keuangan. Sumber daya adalah komponen kunci dari tindakan penegakan kebijakan yang efektif, dan sumber dayapolitik tidak dapat tinggal di atas kertas dan menjadi dokumen.

3. Disposisi

Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implemementor, seperti komitmen, kejujuran, bersifat demokratis.

4. Struktur Organisasi

Struktur organisasi yang bertanggung jawab atas implementasi kebijakan memiliki dampak yang besar terhadap implementasi kebijakan. Salah satu aspek struktural terpenting dari sebuah organisasi adalah adanya standar operasional prosedur (SOP). SOP menjadi pedoman bagi seluruh pelaksana pelaksana.

2.1.5 Teori Pengelolaan

Pengelolaan merupakan istilah yang dipakai dalam ilmu manajemen secara etimologi pengelolaan berasal dari kata "kelola" (to manage) dan biasanya menunjuk pada proses mengurus atau menangani sesuatu untuk mencapai tujuan.

Selanjutnya Hasibuan (2019 : 2) mengemukakan bahwa "Manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan

tertentu". Kemudian menurut Soekanto (Adisasmita, 2014 : 22) mengemukakan bahwa : "Pengelolaan dalam administrasi adalah merupakan suatu proses yang dimulai dari proses perencanaan, pengaturan, pengawasan, penggerakan sampai sampai dengan proses terwujudnya tujuan". Kegiatan pengelolaan atau manajemen dimulai dengan bagaimana cara menentukan arah organisasi di masa yang akan datang, menciptakan aktivitas-aktivitas organisasi, mendorong terbinanya kerjasama antara sesama anggota organisasi, serta mengawasi kegiatan dalam mencapai sebuah tujuan.

Selanjutnya menurut Terry (Hasibuan, 2019 : 38) yang menjelaskan bahwa fungsi dasar manajemen/pengelolaan dalam suatu organisasi terdiri dari (POAC), yaitu :

1. Planning (Perencanaan)
2. Organizing (Pengorganisasian)
3. Actuating (Penggerakan)
4. Controlling (Pengendalian/ Pengawasan)

1. *Planning* (Perencanaan) Fungsi manajemen terpenting yang pertama ialah perencanaan atau planning. Perencanaan adalah suatu pemilihan yang berhubungan dengan kenyataan-kenyataan membuat dan menggunakan asumsi-asumsi yang berhubungan dengan waktu yang akan datang (*future*) dalam menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan yang diusulkan dengan penuh keyakinan untuk tercapainya dengan hasil yang dikehendaknya. Menurut Heri (2016 : 13) mengungkapkan bahwa : “Perencanaan meliputi pemilihan atau penetapan tujuan-tujuan organisasi dan penentuan strategi, kebijaksanaan, proyek,

program, prosedur, metode, sistem, anggaran, dan standar yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan.”

2. *Organizing* (Pengorganisasian) *Organizing* / pengorganisasian adalah proses penentuan, pengelompokan, dan pengaturan bermacam macam aktivitas yang diperlukan untuk mencapai aktivitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan, menenpatkan orang-orang pada setiap aktivitas ini, menyediakan alatalat yang diperlukan menetapkan wewenang secara relatif didelegasikan kepada setiap individu yang akan melakukan aktivitas aktivitas tersebut. Menurut Harsono (2010 : 7) mengungkapkan bahwa : “Pengorganisasian adalah proses membentuk kerjasama antara dua individu atau lebih dalam sebuah struktur tertentu untuk mencapai tujuan atau seperangkat tujuan”.

3. *Actuating* (Penggerakan) *Actuating*/penggerakan adalah membangkitkan dan mendorong semua anggota kelompok agar supaya berkehendak dan berusaha dengan keras untuk mencapai tujuan dengan ikhlas serta serasi dengan perencanaan dan usaha-usaha di dalam organisasi. Menurut Terry dalam Hasibuan (2019:183) mengatakan : “*Actuating is setting all members of the group to want to achieve and to strike to achieve the objective willingly and keeping with the managerial planning and organizing efforts.*” Artinya, penggerakan adalah membuat semua anggota kelompok, agar mau bekerjasama dan bekerja ikhlas serta bergairah untuk mencapai tujuan sesuai dengan perencanaan dan usaha-usaha pengorganisasian.

4. *Controlling* (Pengendalian) *Controlling* merupakan pengadaan penilaian, serta pengoreksian sehingga apa yang di lakukan pegawai dapat di arahkan ke jalan

yang benar dengan maksud tercapai tujuan yang telah di gariskan semula. Dan dalam melaksanakan *controlling* atasan mengadakan pemeriksaan, mencocokkan serta mengusahakan agar kegitatan-kegiatan yang di laksanakan sesuai dengan rencana yang telah di tetapkan serta tujuan yang di capai. Menurut Earl P.Strong mengatakan : “*controlling is the process of regulating the various factors in an enterprise according to the requirement of its plans.*” Artinya : pengendalian adalah proses pengaturan berbagai faktor dalam suatu perusahaan, agar pelaksanaan sesuai dengan ketetapan-ketetapan dalam rencana.

2.1.6 Pengertian Pendapatan Asli Desa (PADes)

Pendapatan Asli Desa (PADes) merupakan segala usaha yang dilakukan oleh pemerintah desa untuk menunjang penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam rangka pelaksanaan otonomi Desa (Undang undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 71). PADes meliputi hasil usaha desa, hasil pengelolaan kekayaan desa yang dipisahkan, hasil swadaya dan partisipasi masyarakat, hasil gotong royong, lain-lain pendapatan asli desa yang sah (Nurcholis, 2011:82). Dalam Peraturan Bupati menegaskan bahwa PADes meliputi hasil usaha desa,

hasil pengelolaan kekayaan desa yang dipisahkan, hasil swadaya dan partisipasi masyarakat, hasil gotong royong, lain-lain pendapatan asli desa yang sah. Berdasarkan kutipan di atas dapat disimpulkan bahwa PADes meliputi merupakan segala usaha yang dilakukan oleh pemerintah desa untuk menunjang penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam rangka pelaksanaan otonomi Desa. PADes meliputi hasil usaha desa, hasil pengelolaan kekayaan desa yang dipisahkan, hasil swadaya dan partisipasi masyarakat, hasil gotong royong, lain-

lain pendapatan asli desa yang sah. Sumber Pendapatan Desa Desa mempunyai hak otonomi, sebagai konsekuensinya desa mempunyai sumber keuangan sendiri. Keuangan desa merupakan semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta Keuangan desa berasal dari sumber pendapatan desa, yang meliputi pendapatan asli desa. Pendapatan desa terdiri atas:

- a. Pendapatan Asli Desa (PADes)
- b. Bagi hasil pajak kabupaten/kota.
- c. Bagian dari retribusi kabupaten/ kota.
- d. Alokasi Dana Desa (ADD)
- e. Bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan desa lainnya.
- f. Hibah
- g. Sumbangan pihak ketiga.

Secara resmi pendapatan desa sebagaimana diatur dalam UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 adalah sebagai berikut:

- a. Pendapatan asli desa terdiri atas hasil usaha desa, hasil asset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapat asli desa.
- b. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- c. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota.
- d. Alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota.
- e. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota

- f. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga.

Terkait sumber pendapatan desa yang dimaksud secara lebih rinci diuraikan sebagai berikut:

A. Pendapatan Asli Desa (PADes).

Sumber pendapatan asli desa terdiri atas hasil usaha, hasil asset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ayat 1a). PADes meliputi:

- a. Hasil usaha desa.
- b. Hasil kekayaan desa.
- c. Hasil swadaya dan partisipasi.
- d. Hasil gotong royong dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah.

Secara resmi Pendapatan Asli Desa (PADes) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 terdiri atas hasil usaha desa, hasil asset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa (Pasal 72 ayat 1). Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa PADes terdiri dari hasil usaha dan kekayaan desa, swadaya dan partisipasi, dan hasil gotong royong serta lain-lain pendapatan asli desa yang sah.

Hasil usaha desa terdiri atas badan usaha milik desa, usaha ekonomi desa, lumbung desa, perusahaan desa, kios desa dan lainlain usaha desa. Hasil kekayaan desa didapat melalui tanah kas desa, pasar desa, pasar hewan milik desa, tambatan perahu milik desa, bangunan desa, pelelangan ikan yang dikelola oleh desa, objek rekreasi milik desa, pemandian umum milik desa, hutan desa, tempat pemancingan umum desa, jalan desa, tanah makam desa, tanggul, saluran tersier

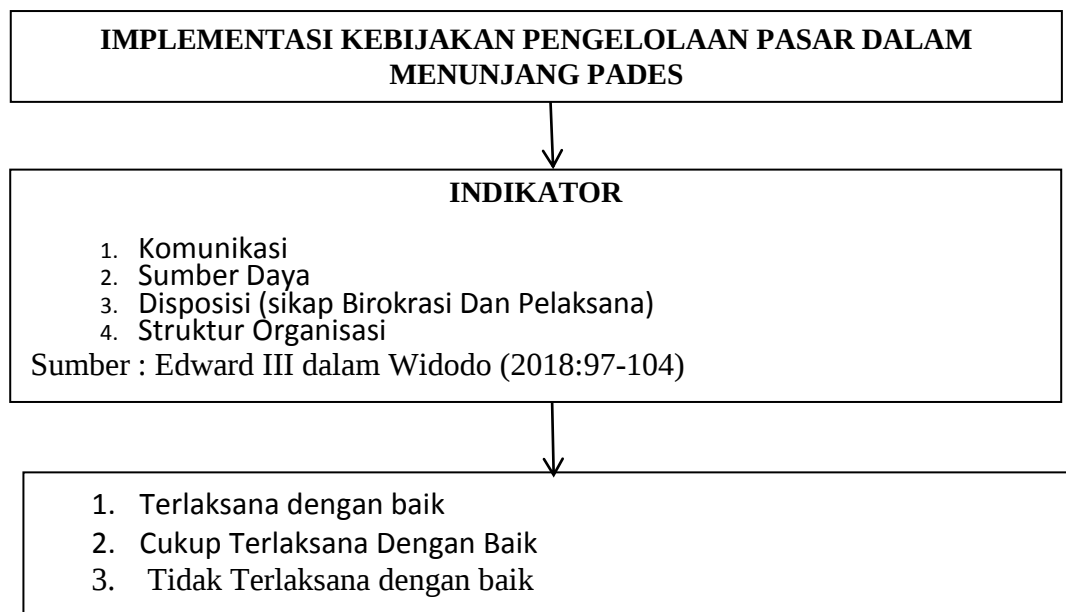
desa, dan lain-lain kekayaan milik desa. Dan hasil swadaya dan partisipasi didapat berupa sumbangan dana tau bantuan untuk pembangunan desa baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak yang diberikan oleh masyarakat desa kepada desa dituangkan dalam Peraturan desa.

Sedangkan hasil gotong royong didapat berupa sumbangan spontan yang bersifat insidental dan sukarela dari warga masyarakat desa setempat baik berupa tenaga, uang maupun barang, serta lain-lain pendapatan asli desa berupa hasil pungutan desa.

2.2 Kerangka Pemikiran

Menurut Mc Gaghie dalam Hayati (2020), kerangka pemikiran ialah proses melakukan pengaturan dalam melakukan penyajian pertanyaan dalam penelitian dan mendorong penyelidikan atas permasalahan yang menyajikan permasalahan dan konteks penyebab peneliti melaksanakan studi tersebut.

Gambar 2.2 Kerangka Berfikir



2.3 Definisi Operasional

2.3.1. Komunikasi

Komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Terdapat tiga indikator yang dapat digunakan dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi, yaitu transmisi, kejelasan informasi, dan konsistensi informasi yang disampaikan.

2.3.2. Sumber Daya

Sumber daya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar berjalan dengan efektif, tanpa adanya sumber daya kebijakan hanya akan menjadi kertas dan dokumen saja. Menurut Edward (dalam Agustino, 2006:151) indikator sumber daya yakni terdiri dari yaitu staff yang cukup (jumlah dan mutu), informasi yang dibutuhkan, kewenangan dan fasilitas/Sarana yang dibutuhkan dalam pelaksanaan.

Selanjutnya Edward III (dalam Widodo, 2008:98) mengemukakan bahwa “faktor sumberdaya ini mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan”. Sumber daya yang dimaksud meliputi:

- a. Sumber Daya Manusia
- b. Sumber Daya Anggaran
- c. Sumber Daya Informasi dan Kewenangan

2.3.3. Disposisi

Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh

implemendor, seperti komitmen, kejujuran, bersifat demokratis.

2.3.4. Struktur Organisasi

Struktur organisasi yang bertanggung jawab atas implementasi kebijakan memiliki dampak yang besar terhadap implementasi kebijakan

2.4 Konsep Variabel

Tabel II.V : Konsep Variabel Penelitian Tentang Implementasi Kebijakan Pengelolaan Pasar Dalam Menunjang Pendapatan Asli Desa Di Desa Titian modang kecamatan kuantan tengah kabupaten kuantan singingi.

No	Judul	Indikator	Sub Indikator	Keterangan
1.	Implementasi Kebijakan Pengelolaan Pasar Dalam Menunjang Pendapatan Asli Desa Di Desa Titian Modang Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.	a. Komunikasi	Kejelasan Efektivitas Efisiensi	Baik Cukup Baik Kurang Baik
		b. Sumber Daya	Sumber Daya Manusia Sumber daya Finansial Sumber Daya Alam	Baik Kurang Baik Baik
		c. Disposisi	Kesadaran & Pemahaman Sikap Responsif Dan Inovatif Komitmen Dan Dedikasi	Baik Cukup Baik Kurang Baik
		d. Struktur Organisasi	Alur Kerja Yang Efisien Mekanisme Pengawasan Dan Evaluasi Peran Dan Tanggung Jawab	Kurang Baik Kurang Baik Kurang Baik

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif ialah metode penelitian yang menjelaskan temuan di lapangan yang tidak memerlukan hipotesis. Kemudian menjelaskan temuan di lapangan. Metode penelitian kualitatif memberikan gambaran tentang pengelolaan dan pelaksanaan kebijakan remunerasi pasar untuk meningkatkan pendapatan asli desa Titian Modang Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi. (Cit. Isma Bakri dalam Suerjono, 2018)

3.2 Informan

Menurut Moleong (2006:132) dalam buku Metode Penelitian Kualitatif, "Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian." Selain itu Andi (2010:147) dalam buku Menguasai Teknik-Teknik Koleksi Data Penelitian Kualitatif menjelaskan bahwa, "Informan adalah orang yang diperkirakan menguasai dan memahami data, informasi, ataupun fakta dari suatu objek penelitian." Dari penjelasan tersebut penulis memahami bahwa informan adalah atasan dan bawahan. Dimana terjadi komunikasi yang berlangsung terus menerus, karena informan adalah orang yang terlibat langsung dalam kegiatan yang akan diteliti :

Tabel III.1 : Informan Penelitian Implementasi Pengeloaan pasar Dalam Mununjang PADes di DesaTitian Modang Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi

No	Informan	Jumlah	Persentase
1.	Kepala Desa	1	7%
2.	Pengelola pasar/ Bumdes	3	22%
3.	Ketua Bumdes	1	7%
3.	Pedagang	9	64%
Jumlah		14	100%

3.3 Sumber Data

3.3.1 Data Primer

Menurut Husein Umar (2013:42) data primer adalah: “Data primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu atau perseorangan seperti hasil dari wawancara atau hasil pengisian kuesioner yang biasa dilakukan oleh peneliti”.

Sedangkan menurut Nur Indrianto dan Bambang Supono (2013:142) data primer adalah: “Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara)”. Contoh data primer adalah data yang diperoleh dari responden melalui kuesioner, kelompok fokus, dan panel, atau juga data hasil wawancara peneliti dengan narasumber.

3.3.2 Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari lembaga tertentu, tidak hanya untuk kepentingan lembaga saja, tetapi juga untuk bagian -bagian

yang membutuhkan lainnya. Ini bertujuan untuk mendapatkan basis atau kerangka pemikiran yang digunakan untuk membahas hasil penelitian.

3.4 Fokus Penelitian

Fokus dalam penelitian ini adalah IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN PASAR DALAM MENUNJANG PADES Didesa Titian Modang Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.

3.5 Lokasi penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan Di Pasar Kenegrian Kopah Desa Titian Modang Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.

3.6 Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian deskripsi-kualitatif, peneliti hanya dapat bekerja menggunakan data, fakta yang didapat melalui observasi. Data ialah factor penting untuk pendukung sebuah penelitian. Semakin banyak data, semakin baik akhir studi. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan tiga metode kualitatif pengumpulan data, jadi kita harus terlebih dahulu memahami metode ini.

3.6.1 Observasi

Observasi ialah Pengamatan dan pencacatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Observasi menjadi salah satu teknik pengumpulan data apabila sesuai dengan tujuan penelitian, di rencanakan dan dicatat secara sistematis, serta dapat dikontrol keandalan (reliabilitas) dan kesahihannya validasi (dalam Usman Dkk, 2017 : 90).

3.6.2 Wawancara

Wawancara menurut Sugiono (2013:231) digunakan sebagai teknik

pengumpulan data ketika peneliti ingin tahu lebih banyak dari responden.

Studi ini menggunakan metode survei mendalam (in-depth survei), yaitu, untuk mengumpulkan sejumlah data dari informasi dengan menggunakan daftar masalah dengan mengacu pada pedoman wawancara yang telah disiapkan secara sistematis untuk memastikan bahwa mereka lebih lengkap dan dapat diandalkan. Wawancara dilakukan melalui presentasi lisan dan cepat informasi yang terkandung dalam pedoman wawancara. Pengawasan dan wawancara dapat dilakukan pada saat yang sama, sementara pengamatan juga dapat mencakup wawancara dengan informan penelitian untuk memperoleh data yang lebih rinci sehingga apa yang terjadi digantung sesuai dengan hasil penelitian

3.6.3 Dokumentasi

Dokumentasi menurut Sugion (2013: 240) yaitu sebuah proses dalam pengumpulan data. Dokumentasi dapat berupa tulisan, gambar atau karya monumental. Dokumentasi ialah tambahan dalam observasi dan wawancara, dokumentasi dilakukan selama pemantauan dan wawancara dengan informasi penelitian di lapangan.

3.7 Metode Analisa Data

Metode Analisis Data Menurut Bogdan dan Biklen, Analisis data ialah proses pencarian data penyusunan data yang sistematis melalui transkrip wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi secara akumulasi menambah pemahaman peneliti terhadap yang ditemukan (dalam Usman Dkk, 2017 : 130).

Menurut sugiyono terdapat tiga model interaktif dalam analisis data, yaitu reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan.

3.7.1 Reduksi Data

Reduksi data termasuk dalam kategori pekerjaan analisis data. Data yang berupa catatan lapangan (filed notes) jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang penting, dicari tema polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Dalam mereduksi data, setiap peneliti akan dipandu oleh tujuan yang akan dicapai. Tujuan utama dari penelitian kualitatif adalah pada temuan. Oleh karena itu, apabila peneliti dalam melakukan penelitian menemukan segala sesuatu yang di pandang asing, tidak dikenal, belum memiliki pola, justru hal tersebut yang harus dijadikan perhatian peneliti dalam melakukan reduksi data. Reduksi data merupakan proses berfikir sensitive yang memerlukan kecerdasan dan kedalaman wawasan yang tinggi.

3.7.2 Pengumpulan Data

Instrumen pengumpulan data merupakan suatu alat yang digunakan dalam penelitian untuk mengumpulkan data dan supaya pengumpulan tersebut sistematis dan mudah. Instrumen penelitian merupakan sesuatu yang sangat penting dan strategi kedudukannya dalam keseluruhan kegiatan penelitian. Dengan instrumen, akan diperoleh data yang merupakan bahan penting untuk menjawab permasalahan, mencari sesuatu yang akan digunakan untuk mencapai

tujuan dan membuktikan hipotesis. Data yang dikumpulkan ditentukan oleh variabel-variabel yang ada dalam hipotesis.

3.7.3 Penarikan Kesimpulan

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Dengan demikian, kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena seperti telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan.

3.8 Jadwal Penelitian

Tabel 3.8 : Jadwal Penelitian Implementasi Kebijakan Pengelolaan Pasar Dalam Menunjang PADES di Desa Titian Modang Kopah

No	Kegiatan	Tahun 2024/2025																											
		Nov				Des				Jan				Feb				Mart				Apr				Mei			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Pengajuan Judul	x	x	X	x																								
2.	Seminar Proposal					x																							
3.	Revisi Proposal						x	x	x																				
4.	Penelitian Lapangan									x																			
5.	Pengelolaan dan Analisis Data									X	x																		
6.	Bimbingan Skripsi													x	x	x	x												
7.	Ujian Skripsi																									x			
8.	Revisi Skripsi																									x	x	x	X

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan Hasil Penelitian dilapangan Dapat Diketahui Bahwa Implementasi Kebijakan Pengelolaan Pasar Dalam Menunjang Pendapatan Asli Desa di Desa Titian Modang Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi Kurang Ter Implementasikan.

6.2 Saran

Saran yang dapat peneliti berikan sebagai masukan terhadap Implementasi Kebijakan Pengelolaan Pasar Dalam Menunjang Pendapatan Asli Desa di Desa Titian Modang Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi yaitu :

1. Sumber Daya manusia perlu ditambah untuk turun langsung kelapangan dan melakukan pengawasan terhadap kebijakan yang telah ditetapkan, untuk menangani permasalahan pengelolaan pasar.
2. Pengurus Pasar Atau bumdes harus lebih Kreatif dan inovatif dalam menciptakan lingkungan pasar yang dapat meningkatkan Pendapatan asli Desa.
3. Pedagang yang ada juga harus tetap Patuh terhadap kebijakan-kebijakan yang dibuat agar dalam pengelolaan pasar lebih optimal dan dapat meningkatkan pendapatan asli desa dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Adisasmita. 2014. *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu

Arianty, N. (2013). *Ilmu Manajemen Dan Bisnis*. Sumatera Utara. Universitas Muhammadiyah.

B. Jurnal

Damsar. 2016. *Pengantar Sosiologi Pedesaan*. Yogyakarta: Kencana Prenada Gumilar, Gugumgum 2001. *Perubahan Sosial Masyarakat*. Jakarta: Graha Cipta

Garis, R. R., Sihab, A. A., & Tiarani, W. A. (2020). *Efektivitas Pengadaan Barang dan Jasa Oleh BUMDes dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa*. *Musamus Journal of Public Administration*, 3(1), 1-9.

Harsono. 2010. *Manajemen Pengantar*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi YKPN

Hasibuan, Malayu, S.P. 2019. *Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah*. Jakarta : Bumi Aksara Heri. 2016. *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta : Grasindo

Heri. 2016. *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta : Grasindo Lukito, Yulia Nurliani. 2018. *Revitalisasi Ruang Pasar Tradisional Melalui Pendekatan Desain dan Interaksi Pengguna Ruang*. Yogyakarta : Deepublish.

Muhammad. 2019. *Pengantar Ilmu Administrasi Negara*. Kampus Bukit Indah Lhokseumawe. Unimal Press.

Mulyadi. 2010. *Sistem Akuntansi*. Jakarta : Salemba Empat

Nurcholis, Hanif. 2011. *Pertumbuhan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta : Penerbit Erlangga

Saparin. *Tata Pemerintahan dan Administrasi Pemerintahan Desa*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1986.

Sugiman. 2018. *Pemerintahan Desa*. Jakarta.. Universitas Surya Darma.

Tjiptono. 2011. *Service Management Mewujudkan Layanan Prima*. Edisi 2. Yogyakarta: Andi

Usman Husaini dkk. 2017. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta. PT Bumi Aksara.

C. Skripsi

AISIYAH AMINI. 2022. *IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RETRIBUSI PASAR DALAM MENUNJANG PENDAPATAN ASLI DAERAH*. (Tempat). Universitas Muhammadiyah Matara

Perundang-Undangan

Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOT) Pemerintahan Desa

Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014, Pemerintahan Desa

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Desa.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ayat 1a Tentang Pendapatan Asli Desa.

Data Desa Titian Modang Tahun 2024